

DAFTAR PUSTAKA

- Suardani, N. L. P. R., Purnamawati, I. G. A., Kurniawan, P. S., & ST, M. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Sistem Informasi Pada Industri Perhotelan di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Firdaus, F. (2020). Inovasi Administrasi Perpajakan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box pada Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, 4(2), 143-161.
- Risyanli, F., Pribadi, D., & Bahri, S. (2019). Sistem Informasi Monitoring Pembayaran Pajak (SIMPEJAK) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. *Swabumi*, 7(1), 77-83.
- Saputra, F., Heriyanto, M., & Farida, L. PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(2), 89-95.
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23-34.
- Prof. Dr. Madiasmo, MBA., Ak. "Perpajakan." Buku edisi revisi 2008, Penerbit CV Andi Offset.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak "Perpajakan", edisi revisi 2003, penyusun Mardiasmo
- V.wiratna sujarwerni, "sistem akuntansi".penerbit pustaka baru press Yogyakarta (2019)
- Anastasia Diana lilis setiawati, "Perpajakan Indonesia, konsep aplikasi dan penuntun praktis ." Penerbit andi Yogyakarta (2009)
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2020 tentang " Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik".
- Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas".
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang " Tata Cara Pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Masa Tanggap Darurat dan Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Banyumas".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang " Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang " Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang " Pajak Daerah dan Retribusi Daerah".